



Sosial Movement Berbasis Religiusitas: Studi Kasus Gerakan Aksi Bela Islam 212

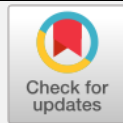
Adelia Putri Apriani¹, Salma Asmarani Musyanova², Sherly Zaneta³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

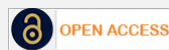
*Korespondensi: aadelia.putri11@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 01 Januari 2024;
Diterima: 10 Februari 2024;
Dipublikasi: 28 Februari 2024;



Copyright © 2024. Owned by Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Apriani, A.P., Salma Asmarani Musyanova, S.A., Zaneta, S. 2024. Sosial Movement Berbasis Religiusitas: Studi Kasus Gerakan Aksi Bela Islam 212.

Journal of Social Contemplativa. 2(1); 19-32.

ABSTRAK

Gerakan aksi bela islam 212 merupakan salah satu implementasi dari politik identitas di Indonesia. Gerakan 212 ini dimulai sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disebut Ahok di Jakarta saat itu, yang mana beliau mendesak orang-orang untuk menolak terpengaruh oleh ayat 51 di dalam Surat Al-Maidah. Hal itu menimbulkan gejolak di dalam diri umat muslim di Indonesia, karena Ahok dinilai penistaan agama oleh umat muslim. Adanya gerakan sosial umat muslim tersebut menunjukkan bahwa Gerakan 212 menjadi perwujudan akan perjuangan untuk membela aspek religi di dalam agama Islam yang dihancurkan oleh seorang gubernur Jakarta pada tahun 2016. Adapun tujuan dalam artikel jurnal berikut yaitu untuk menganalisis sejauh mana gerakan aksi bela islam 212 sebagai gerakan social yang mempengaruhi dinamika partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, adapun prosedur pengumpulan data untuk artikel jurnal yaitu melalui studi dokumen dan literatur. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwasannya gerakan ini berhasil menggalang partisipasi masyarakat melalui mobilisasi yang efektif melalui retorika religius. Solidaritas di antara peserta gerakan muncul karena adanya panggilan moral untuk membela ajaran agama yang dianggap terancam. Penyadaran terhadap isu-isu agama juga menjadi salah satu dampak positif dari partisipasi dalam Gerakan 212, menciptakan masyarakat yang lebih sadar terhadap nilai-nilai keagamaan dan isuisu yang berkaitan.

Abstract *The Islamic Defense Movement 212 is one of the implementations of identity politics in Indonesia. The 212 movement began as a reaction to a statement made by then Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), in which he urged people to refuse to be influenced by verse 51 in Surah Al-Maidah. This caused turmoil among Muslims in Indonesia, because Ahok was considered blasphemy by Muslims. The existence of the Muslim social movement shows that the 212 Movement is a manifestation of the struggle to defend the religious aspects of Islam that were destroyed by a Jakarta governor in 2016. The purpose of the following journal article is to analyze the extent to which the 212 Islamic defense action movement as a social movement affects the dynamics of community participation. The research method used is a qualitative research approach with a descriptive analysis method, while the data collection procedure for journal articles is through document and literature studies. The results obtained from this research are that this movement succeeded in mobilizing community participation through effective mobilization through religious rhetoric. Solidarity among*



movement participants emerged because of a moral call to defend religious teachings that were considered threatened. Awareness of religious issues is also one of the positive impacts of participation in the 212 Movement, creating a society that is more aware of religious values and related issues.

Kata Kunci: *Social movement; Aksi Bela Islam 212; Participation; Identity politics*

1. Pendahuluan

Keberagaman di Indonesia tentunya membawa pengaruh di dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun bernegara. Berbicara keberagaman, Indonesia menjadi negara dengan agama yang beragam, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan begitu, agama yang plural membawa persatuan yang ada di Indonesia dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal itu memberikan isyarat bahwa agama menjadi komponen dalam mempersatukan adanya perbedaan di dalam kehidupan religi masyarakat Indonesia. Akan tetapi dengan agama plural tersebut, Indonesia harus memberikan fokusnya terhadap aspek keagamaan yang bisa saja menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan bernegara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya agama menjadi sebuah hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek di dalam keagamaan seringkali dihubungkan dengan banyaknya aspek kehidupan di masyarakat, salah satunya yang berkembang di negara Indonesia yakni aspek politik. Terkadang keberadaan agama di dalam politik seringkali menjadi sebuah kontroversi yang menuai konflik atau perpecahan. Adanya kondisi seperti itu menimbulkan kekhawatiran akan kondisi sosial didalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat (Burlian, 2016) menyatakan bahwa, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan, perasaan benci, serta amarah yang dapat menyebabkan para pemeluk agama mengambil tindakan pembelaan diri terhadap pemeluk agama lain, menyebabkan sentimen agama muncul ke permukaan dan memecah belah umat beragama serta merusak kerukunan.

Melihat kondisi di Indonesia, realitanya keadaan tersebut sudah terjadi dan menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan bernegara. Tercermin dari adanya fenomena Gerakan 212. Seringkali Gerakan 212 disebut sebagai politik identitas yang ada di Indonesia. Sebagai gerakan sosial yang ada di Indonesia, Gerakan 212 ini dimulai sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disebut Ahok di Jakarta saat itu, yang mana beliau mendesak orang-orang untuk menolak terpengaruh oleh ayat 51 di dalam Surat Al-

Maidah. Hal itu menimbulkan gejolak di dalam diri umat muslim di Indonesia, karena Ahok dinilai penistaan agama oleh umat muslim. Adanya gerakan sosial umat muslim tersebut menunjukkan bahwa Gerakan 212 menjadi perwujudan akan perjuangan untuk membela aspek religi di dalam agama Islam yang dihancurkan oleh seorang gubernur Jakarta pada tahun 2016.

Dengan demikian, keberadaan gerakan sosial ini mencerminkan sebuah identitas keagamaan yang mempengaruhi kondisi politik pula. Terlihat bahwa Gerakan 212 dilatarbelakangi oleh salah satu aktor politik di Indonesia, sehingga dampak yang signifikan tersebut berada pada kondisi politik dapat diartikan bahwa hal itu berdampak pada keadaan politik di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Dengan kontroversi politik dan agama yang disandingkan, memberikan perwujudan bahwa adanya gejolak perlawanan bagi umat yang terlibat, khususnya umat muslim. Terlebih gerakan sosial tersebut seringkali dihubungkan dengan dinamika politik yang ada di Indonesia. Pertimbangan yang ada menjadi sebuah dampak pula yang disadari umat muslim terhadap kasus tersebut yang dilakukan oleh aktor politik bahkan pemangku kekuasaan yang diamanahkan menjadi gubernur Jakarta pada saat itu.

Sehingga, gerakan sosial atau *social movement* yang diselimuti oleh aspek agama atau religi memberikan dampak pada salah satu aspek bernegara, yakni politik. Dengan dimulainya dari sebuah aktor politik yang memberikan sebuah pandangan, tetapi dinilai melakukan penistaan pada salah satu agama di Indonesia, yakni Islam membuat suatu perpecahan dan merubah dinamika politik yang ada. Gerakan 212 tersebut sampai saat ini masih menjadi pengaruh yang kuat dan pergerakan sosial yang kuat pula pada kondisi agama dan politik di Indonesia. Umat Muslim di Indonesia menjadikan gerakan sosial melalui Gerakan 212 tersebut sebagai tameng pemecah kasus yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta saat itu, yakni Ahok.

Diambilnya gerakan sosial berbasis religi tersebut dengan membawakan kasus Gerakan 212 menjadi kunci bahwa pergerakan suatu umat beragama memberikan dampak yang cukup menuai ke beberapa aspek kehidupan bernegara. Gerakan 212 juga memberikan adanya identitas politik yang kuat di Indonesia. Menjadi sebuah tantangan yang berat untuk Indonesia karena melibatkan adanya agama di dalam dinamika politik, sehingga agama menjadi kekuatan pula di dalam dinamika politik yang hidup di Indonesia. Gerakan 212 menjadi simbol perjuangan umat muslim di Indonesia sehingga membawa perubahan-perubahan dari keadaan politik yang sebelumnya ada di Indonesia.

Munculnya sebuah kontroversi yang menuai konflik sehingga membawa adanya gerakan sosial didalam masyarakat Indonesia, khususnya umat mayoritas yakni Islam menimbulkan sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan itu dapat diperjelas dengan berbagai macam pertanyaan yang muncul sebagai bahan penelitian. Permasalahan tersebut memberikan pertanyaan faktor apa saja yang memicu munculnya Gerakan 212 sebagai gerakan sosial berbasis religiusitas dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Lain dengan itu, kondisi agama yang sering disandingkan dengan dinamika politik menimbulkan pertanyaan mengapa dinamika sosial Gerakan 212 dihubungkan dengan adanya politik identitas di Indonesia. Terakhir, permasalahan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga bagaimana dinamika sosial gerakan 212 dalam konteks religiusitas mempengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis dinamika Gerakan Aksi Bela Islam 212 sebagai sosial movement berbasis religiusitas. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akar penyebab munculnya Gerakan 212 dan bagaimana faktor-faktor religiusitas menjadi pemicu utama dalam mobilisasi massa. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran religiusitas dalam membentuk gerakan sosial dan bagaimana hal tersebut mencerminkan dinamika sosial di Indonesia.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak partisipasi masyarakat dalam Gerakan 212 terhadap identitas kolektif. Melalui pendekatan studi kasus, kami bermaksud untuk menggali bagaimana partisipasi dalam gerakan ini memberikan kontribusi pada pembentukan identitas kolektif di kalangan peserta gerakan. Tujuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah protes, tetapi juga sebagai pembentuk identitas yang kuat di antara pesertanya.

kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam mengamplifikasi dinamika sosial Gerakan 212. Dalam era digital, media sosial memainkan peran sentral dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, tujuan ini adalah untuk menyelidiki bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap gerakan ini, dan bagaimana pesan-pesan religiusitas gerakan tersebut tersebar dan diterima di platform tersebut.

Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari Gerakan Aksi Bela Islam 212 terhadap dinamika sosial, politik, dan kehidupan masyarakat di

Indonesia. Dengan memahami dampak jangka panjang gerakan ini, penelitian ini berusaha memberikan pandangan yang lebih holistik tentang peran dan relevansi gerakan sosial berbasis religiusitas dalam transformasi masyarakat. Tujuan ini mencakup aspek- aspek seperti perubahan sikap politik, pergeseran budaya, dan evolusi identitas sosial di tengah-tengah perkembangan sosial yang dinamis di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada artikel jurnal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisa bagaimana latar belakang Gerakan social yaitu gerakan aksi bela islam 212, pengukuran seberapa jauh gerakan aksi bela islam 212 ini menjadi politik identitas, dan bagaimana gerakan ini dapat menjadi dinamika social dalam konteks religiusitas yang mempengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat. Secara definisi, penelitian kualitatif adalah segala jenis penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau prosedur statistik untuk menghasilkan data (Strauss & Corbin, 2003). Gunawan (2022) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang tidak didasarkan pada teori-teori yang sudah ada sebelumnya, melainkan berfokus pada pengalaman yang terjadi secara alamiah di lapangan sebagai dasar untuk memulai sebuah proyek penelitian dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik." Karena tujuan utama dari penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis dalam rangka memastikan signifikansi atau relevansi perbedaan atau korelasi antar variabel, maka metode kualitatif dianggap tepat. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan utama yaitu dapat memberi solusi terhadap rumusan masalah yang timbul dengan analisis yang tepat dan penjelasan yang relevan.

Metode analisis deskriptif tersebut dapat memberikan gambaran yang bersifat objektivitas yang sesuai di lapangan. Pendekatan ini akan memberikan penjelasan berdasarkan statistik dan informasi yang tersedia secara objektif. Agar penjelasan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, penjelasan tersebut disajikan secara sistematis. Karena merupakan komponen dari pendekatan kualitatif, metode deskriptif menjadi penting dalam penelitian ini karena digunakan untuk mendeskripsikan materi yang menggunakan kata-kata atau gambar untuk menjelaskan atau mengkomunikasikan suatu ide atau fenomena (Buhori, Gunawan, & Fautanu, 2020). Pendekatan ini sangat relevan dengan studi kasus gerakan 212 yang berfokus pada gerakan sosialnya. Ciri-ciri individu atau kelompok individu dalam kaitannya dengan politik identitas mereka dijelaskan secara metodis dan menyeluruh melalui penggunaan

metodologi deskriptif.

Adapun prosedur pengumpulan data untuk artikel jurnal yaitu melalui studi dokumen dan literatur. Studi dokumen terbagi menjadi dua kelompok utama, dokumen resmi dan dokumen pribadi (Bungin: 2007). Catatan tertulis yang berkaitan dengan individu tertentu dan mewakili perilaku, pengalaman hidup, dan pendapat mereka disebut dokumen pribadi. Dokumen ini dapat berupa pesan-pesan pribadi, surat-surat yang ditulis untuk orang-orang tertentu, atau kisah-kisah otobiografi.

Dokumen internal dan eksternal adalah dua kategori yang termasuk dalam dokumen formal atau resmi. Catatan, pemberitahuan resmi, arahan, aturan rapat, pilihan kepemimpinan, kesimpulan, dan tradisi yang berkaitan dengan orang atau organisasi tertentu adalah contoh dokumen internal. Di sisi lain, materi eksternal terdiri dari artikel cetak atau majalah, buletin, dan komunikasi yang dikirim ke media. Di sisi lain, studi literatur adalah serangkaian prosedur di mana informasi dan tulisan dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian di masa depan. Proses memperoleh pengetahuan melalui pemahaman artikel online, buku, dokumen, dan sumber data lain yang dianggap relevan dan sesuai dengan proyek penelitian yang sedang dilakukan berkaitan dengan pendekatan studi literatur ini (Zed, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gerakan sosial berbasis religiusitas

Mobilisasi massa dan dukungan terhadap Gerakan 212 dipengaruhi oleh sejumlah faktor kontekstual di masyarakat. Faktor-faktor seperti ketegangan politik, isu agama, kepercayaan dan nilai-nilai budaya, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau kebijakan tertentu dapat menjadi pendorong utama dalam menggalang dukungan untuk gerakan tersebut. Dalam Gerakan 212, ada elemen sosiologis yang mengaitkan partisipasi dan dukungan masyarakat dengan perasaan bahwa komunitas Islam atau nilai-nilai agama mereka mungkin terancam. Persepsi ini dapat muncul karena isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam, seperti penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama, kebijakan pemerintah yang dianggap mengganggu kebebasan beragama, atau upaya perubahan regulasi yang dianggap merugikan komunitas Islam. Hal ini bisa menjadi pemicu untuk memobilisasi massa dalam gerakan 212. Gerakan 212 mencerminkan posisi sosial komunitas Islam yang merasa terancam oleh beberapa isu, seperti dugaan penistaan agama yang memicu kecaman dan protes dari sebagian

masyarakat Islam di Indonesia. Gerakan ini juga melibatkan mereka yang merasa keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengganggu kebebasan beragama atau mendiskreditkan nilai-nilai agama Islam. Pada saat Gerakan 212 berlangsung, banyak anggota komunitas Muslim Indonesia merasa bahwa identitas dan eksistensi mereka dalam bahaya. Beberapa isu yang muncul pada waktu itu, seperti dugaan penistaan agama, perubahan kebijakan yang dianggap mengganggu kebebasan beragama, serta ketegangan politik, menyebabkan kekhawatiran dalam komunitas Muslim Indonesia. Hal ini memicu rasa perlu untuk melindungi keyakinan, nilai-nilai agama, dan identitas keislaman mereka, yang pada gilirannya mendorong partisipasi dan dukungan terhadap Gerakan 212 sebagai bentuk protes dan perlindungan terhadap eksistensi komunitas tersebut.

Beberapa studi lapangan telah mengungkapkan bahwa di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, terdapat persepsi atau pandangan bahwa umat Islam sedang mengalami penindasan. Persepsi ini bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk perasaan bahwa nilai-nilai agama mereka dianggap rendah, penegakan hukum yang dianggap tidak adil terhadap kasus-kasus yang melibatkan agama Islam, atau adanya kebijakan yang dinilai merugikan atau mengintervensi kehidupan beragama umat Islam. Ketika masyarakat merasa adanya penindasan terhadap agama atau komunitas mereka, hal ini bisa menjadi pendorong kuat untuk bersatu dan berpartisipasi dalam gerakan sosial atau politik, seperti Gerakan 212, sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka persepsikan sebagai ancaman terhadap identitas dan keberadaan agama mereka. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa sebanyak 52% dari responden merasa umat Islam tidak dihargai dan terpinggirkan dalam sistem politik Indonesia. Hal ini mencerminkan persepsi yang cukup signifikan di kalangan masyarakat terkait perasaan tidak terpenuhinya kebutuhan atau perlakuan yang adil terhadap umat Islam dalam ranah politik. Sentimen seperti ini seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik dan terkadang memunculkan gerakan atau tindakan sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan tersebut.

Rivalitas politik antara elit Muslim dan kubu Ahok telah mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, terutama dalam konteks Gerakan 212. Benturan antara Habib Rizieq dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memainkan peran penting dalam memperkuat polarisasi politik di antara kelompok-kelompok tersebut. Gerakan 212 sendiri merupakan gerakan massa yang memprotes dugaan penistaan agama yang terjadi pada Ahok, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam politik

Indonesia yang mencerminkan perbedaan pandangan politik, agama, dan sosial dalam masyarakat. Ambisi politik Ahok untuk kembali maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta memicu kontroversi dan memperkuat isu-isu terkait SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pengalaman masa lalu Ahok yang pernah terlibat dalam kontroversi terkait agama saat pemilihan gubernur sebelumnya menjadi landasan bagi lawan-lawannya untuk menghidupkan kembali isu-isu sensitif tersebut. Hal ini menciptakan polarisasi di antara pendukung dan lawan politiknya, serta mempengaruhi dinamika politik dan respons masyarakat terhadap kampanye politiknya. Sentimen anti-Ahok semakin memperkuat posisi elit Muslim garis keras, dan Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq menjadi salah satu organisasi yang memainkan peran penting dalam mengorganisir Gerakan 212. Gerakan ini dianggap sebagai wadah politik yang menggalang dukungan melawan dominasi atau pengaruh politik yang diwakili oleh kelompok yang dipimpin oleh Ahok. Dalam konteks politik Indonesia, Gerakan 212 menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan dan kebijakan yang dianggap menyinggung atau merugikan bagi kelompok-kelompok tertentu yang teridentifikasi dengan kepentingan agama dan budaya tertentu.

3.2 Dinamika sosial politik identitas di Indonesia

Melihat latar belakang dari adanya gerakan 212 tersebut sebagai kekuatan umat muslim untuk menindaklanjuti aktor politik, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Beliau dinilai telah melakukan penistaan agama yang ditujukan kepada umat muslim di Indonesia. Sehingga respon umat muslim melalui adanya Gerakan 212 tentu mewujudkan pengakomodiran politik identitas sebagai tameng dalam melakukan perjuangan dalam membela agama Islam. Oleh karena itu, gerakan 212 dipandang memiliki nuansa politis mengingat statusnya sebagai gerakan keagamaan di era modern.

Gerakan 212, juga dikenal sebagai Aksi Bela Islam, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016, memberikan bukti untuk mendukung gerakan sosial berbasis religiusitas yang memberikan dampak pada politik Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sudah dijelaskan sebelumnya, memang dasar dari arah Gerakan 212 ini dimulai sebagai bentuk protes terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Setelah 2 Desember 2016, gerakan 212 berkembang menjadi gerakan politik berbasis identitas, mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai kandidat. Terlibat bahwa, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

memiliki citra agama Islam yang sangat baik, sehingga menimbulkan kesatuan di dalam masyarakat Indonesia. Interpretasi lainnya, bahwa mobilisasi Gerakan 212 selama Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi jalannya politik dan hasil pemilu.

Sebenarnya, dengan melihat bagaimana gerakan sosial berlandaskan agama dan politik ini sudah sangat menjelaskan bagaimana hubungan maupun keterlibatan politik identitas di dalamnya. Sehingga, masyarakat pun menilai kekuatan religiusitas yang dipancarkan oleh gerakan sosial Islam ini sangat berpengaruh dalam proses jalannya

Politiknya, khususnya dalam melihat Pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017. Tak jarang pemberitaan di media sosial mengenai Gerakan 212 ini pun sangat masif. Dinaikannya pemberitaan tersebut, tentu lebih memicu gejolak semangat umat Muslim dalam menjunjung nilai keagamaan dan koneksi pada aspek politik di Indonesia, hal itu sejalan dengan keinginan menjatuhkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Tertuang jelas, bahwa proses pembentukan politik identitas komunitas Muslim di Jakarta sangat dipengaruhi oleh media sosial, terutama sejak Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, yang kemudian menjadi viral dan membuat geram sebagian besar Muslim.

Dinamika sosial dari gerakan 212 ini menjalin konektivitas terhadap identitas politik di Indonesia yang mana memperlihatkan kelompok maupun organisasi islam dengan identitas politiknya yang kuat, yakni Amin Rais memimpin para kader Muhammadiyah yang hadir selain FPI. Selain itu, ada juga Arifin Ilham, Abdullah Gymnastiar, dan Ma'ruf Amin, ketua MUI. Pada kenyataannya, gerakan 212 juga didukung oleh kelompok-kelompok Islam seperti Persatuan Islam dan Persatuan Umat Islam. Aktor dalam keterlibatannya dengan agama dan identitas politiknya sama memainkan peran yang sangat signifikan dalam membela agama Islam yang telah dinistakan agamanya oleh aktor politik pula yang berasal dari non-muslim.

Mengambil kasus Gerakan 212 sebagai sosial movement atau gerakan sosial berbasis religiusitas memperjelas bahwa makna politik identitas merupakan politik yang menekankan identitas sebagai faktor yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal itu Aksi Bela Islam sebagai seruan yang menandakan adanya akomodir umat Islam untuk menyuarakan persoalan Gubernur Ahok pada saat itu yang telah melakukan penistaan agama, maka aksi atau gerakan tersebut membawa pengaruh pada elektabilitas politik Ahok dan pemberian hukuman untuk Ahok sebagai bentuk tujuan umat Muslim dalam gerakan sosial berbasis religiusitas tersebut. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta

tahun 2017 memang menyentuh isu-isu yang sensitif terkait SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kontestasi politik tersebut terutama berkaitan dengan agama dan etnis, memicu perdebatan sengit serta ketegangan antar pendukung kandidat. Isu SARA seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang sayangnya dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik sosial.

Gerakan 212 di Indonesia, yang bermula dari protes besar-besaran pada 2 Desember 2016, memiliki fondasi kuat dalam memperkuat identitas keagamaan sebagai modal sosial untuk dakwah dan mobilisasi massa. Gerakan ini diawali sebagai protes terhadap dugaan penistaan agama oleh seorang gubernur Jakarta saat itu. Gerakan 212 menggunakan narasi agama dan identitas keislaman sebagai landasan utama untuk memperoleh dukungan dan memobilisasi massa besar dalam aksi-aksi mereka. Identitas keagamaan yang kuat menjadi pendorong utama dalam menggalang solidaritas dan kesatuan dalam gerakan tersebut. Identitas agama yang kuat seringkali menjadi pendorong utama dalam memperkuat rasa solidaritas dan komitmen anggota dalam suatu gerakan sosial. Kepercayaan, nilai-nilai bersama, dan tujuan yang didasarkan pada aspek keagamaan cenderung menguatkan ikatan di antara anggota gerakan tersebut. Identitas agama yang kuat membantu menumbuhkan rasa persatuan, kesetiaan, serta komitmen yang tinggi terhadap tujuan bersama, memperkuat hubungan di antara mereka dalam mencapai tujuan sosial atau politik yang diinginkan. Dalam konteks Gerakan 212 dan protes terhadap Ahok, narasi yang mengklaim bahwa Ahok telah menodai agama mayoritas berhasil memperkuat identitas keislaman massa. Penggunaan narasi ini untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap Ahok menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat kesadaran akan identitas keislaman di kalangan massa yang terlibat dalam gerakan tersebut. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara mereka yang merasa agamanya dianggap terganggu atau dianiaya oleh tindakan yang dianggap menista agama.

3.3 Bagaimana dinamika sosial gerakan 212 dalam konteks religiusitas mempengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat.

Gerakan aksi bela islam 212 atau biasa disebut gerakan 212, dalam konteks religiusitas, memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi dan dukungan masyarakat. Hakikatnya gerakan social sendiri sudah menjadi bagian dari bentuk partisipasi politik dari masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aksi bela islam yang terjadi pada tanggal 2

Desember 2016 merupakan aksi unjuk rasa dengan massa terbesar yang bersifat massif kolosal dan dengan jangkauan nasional. Masyarakat yang mengikuti aksi 212 juga berasal dari ragam latar belakang mulai dari selebritis, akademisi, organisasi masyarakat, anak-anak muda, dan lainnya. Namun dari banyaknya keberagaman latar belakang mereka memiliki tujuan yang sama, dengan berlandaskan islam sebagai agama mayoritas menguatkan mereka sebagai massa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Setelah gerakan ini usai, pola yang terbentuk tidak membuat gerakan ini menjadi redup namun semakin menguat dalam beberapa aspek. Gerakan 212 telah terimplikasi dalam lembaga social, politik, dan ekonomi. Gerakan ini sebagai protes terhadap dugaan penistaan agama, tetapi seiring berjalannya waktu, dinamika sosial yang melibatkan aspek religiusitas memainkan peran kunci dalam membentuk partisipasi dan dukungan masyarakat.

Gejala social politik yang memiliki kaitan dengan aktivitas individu maupun kelompok dengan landasan islam sebagai ideologinya dapat disebut dengan gejala keagamaan. Adapaun yang menjadi perbedaan islam politik dengan gerakan social politik lainnya yaitu antara lain; tokoh yang terlibat, aktivisme, dan yang terakhir yaitu ideologi (Hasan, 2013: 2-3). Terjalannya gerakan social antara lain karena terdapat aksi kolektif dari massa aksi yang tak lain adalah keyakinan akan keberhasilan yang memberikan inspirasi dan motivasi juang segala kegiatan social (Klandermans, 2005: 7-10). Faktor- faktor yang timbul bersamaan dengan kegiatan social yaitu adanya rasa ketidakadilan dalam pernyataan atau tindakan, adanya elemen penguat yaitu identitas, dan factor agensi.

Rasa ketidakadilan dalam pernyataan atau tindakan timbul akibat kegusaran moral yang memiliki keterkaitan dengan rasa kekecewaan akan perlakuan yang tidak setara dan menyakiti perasaan individu maupun kelompok social. Selanjutnya factor adanya elemen penguat yaitu rasa kemarahan terhadap suatu fenomena dan massa yang terlibat adalah bentuk pengekspresian dalam tuntutan meminta pertanggung jawaban. Yang terakhir yaitu factor agensi, yaitu mengacu pada kepercayaan bahwa dengan aksi bersama dapat mengubah kondisi atau kebijakan tertentu. Rasa kekecewaan dasarnya menjadi poin pendorong utama yang diperlukan dalam partisipasi gerakan, namun perasaan ketidakpuasan yang sama dan tujuan menjatuhkan penguasa yang salah tidak cukup untuk mendorong banyak massa untuk ikut dalam aksi kolektif. Tiap individu tersebut harus memiliki keyakinan bahwasannya dengan kekuatan bersama dapat mengubah kondisi yang mereka perjuangkan, maka dari itu kemunculan agen menjadi lebih berkesan secara politik (Klandermans, 2005).

Dalam unsur partisipasi politik, Gerakan Aksi Bela Islam 212 merupakan gerakan politik praktis. Sebab setelah usainya aksi massa tersebut timbul beberapa lembaga social berlatar belakang alumni gerakan 212 antara lain, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Presidium 212 dan Garda 212. Dengan munculnya lembaga social yang berlandaskan politik maka massa aksi 212 sudah menegaskan bahwasannya konsolidasi terhadap umat islam yaitu bagaimana kita dapat memilih pemimpin dalam ranah kepala desa, legislative pemilu atau pilpres dengan bijak dan bertanggung jawab dengan mencari latar belakang pemimpin yang memang berkualitas menjadi pemimpin. Politik islam melalui aksi bela islam 212 ini juga membuka jalan bagi umat islam untuk berkuasa melewati jalur konstitusional. Partisipasi dalam Gerakan 212 bukan hanya tentang aksi protes, melainkan juga membentuk identitas kolektif. Peserta gerakan merasa bahwa mereka adalah bagian dari suatu komunitas yang berjuang untuk melindungi nilai-nilai agama. Identitas ini memperkuat rasa solidaritas di antara peserta dan menciptakan ikatan yang kuat dalam wujud kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam keseluruhan, Gerakan 212 merupakan contoh nyata bagaimana dinamika sosial dalam konteks religiusitas dapat memengaruhi partisipasi dan dukungan masyarakat. Melalui mobilisasi, penyadaran, pembentukan identitas kolektif, media sosial, peran pemimpin, dan kegiatan keagamaan, gerakan ini telah menciptakan gelombang partisipasi yang bersumber dari nilai-nilai agama dan solidaritas kolektif yang kuat di masyarakat Indonesia. Adapun output dari gerakan aksi bela islam ini berhasil terakomodir dengan ditetapkannya Ahok sebagai pelaku tersangka utama pencemaran unsur keagamaan dengan dijatuhi hukuman berupa dua tahun

4. KESIMPULAN

Dalam artikel ini, kami telah mengkaji dinamika sosial dari Gerakan Aksi Bela Islam 212, sebuah sosial movement yang memiliki basis kuat dalam religiusitas. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu kontroversial terkait agama di Indonesia, khususnya dugaan penistaan agama. Analisis kami menunjukkan bahwa dinamika sosial Gerakan 212 sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religiusitas yang memainkan peran sentral dalam memobilisasi massa, membentuk identitas kolektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keagamaan.

Gerakan ini berhasil menggalang partisipasi masyarakat melalui mobilisasi yang efektif melalui retorika religius. Solidaritas di antara peserta gerakan muncul karena adanya panggilan

moral untuk membela ajaran agama yang dianggap terancam. Penyadaran terhadap isu-isu agama juga menjadi salah satu dampak positif dari partisipasi dalam Gerakan 212, menciptakan masyarakat yang lebih sadar terhadap nilai-nilai keagamaan dan isu-isu yang berkaitan. Pembentukan identitas kolektif menjadi fenomena menarik dalam Gerakan 212, di mana peserta gerakan merasa terhubung sebagai bagian dari suatu komunitas yang berjuang untuk melindungi nilai-nilai agama. Hal ini memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara peserta gerakan, menciptakan dinamika sosial yang kuat. Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat dinamika sosial Gerakan 212, memperluas jangkauan pesan religiusitas dan memobilisasi dukungan.

Pentingnya peran pemimpin dalam membentuk narasi dan memberikan arah pada Gerakan 212 juga terungkap dalam analisis ini. Tokoh-tokoh kunci, baik dari kalangan ulama maupun aktivis masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap gerakan ini. Selain itu, kegiatan keagamaan yang diintegrasikan ke dalam gerakan menciptakan pemantapan solidaritas dan kebersamaan di antara peserta gerakan. Dalam keseluruhan, Gerakan Aksi Bela Islam 212 menunjukkan bahwa dinamika sosial dalam konteks religiusitas dapat memainkan peran sentral dalam membentuk partisipasi dan dukungan masyarakat. Gerakan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor religiusitas, solidaritas kolektif, media sosial, dan kepemimpinan dalam membentuk fenomena sosial yang signifikan di Indonesia. Studi kasus ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana gerakan sosial dapat menjadi wadah ekspresi nilai-nilai agama dan menciptakan dinamika sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022, Desember). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6, 88-100.
- Aminudin, M. A., Pratiwi, M. A., & Cahyowirawan, A. M. (2023, Desember). Dinamisasi Politik Identitas di Indonesia (Studi Kasus: Mobilisasi Gerakan 212 Pada Pilkada DKI 2017). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 1-11.
- Anselm, S., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Argenti, G. (2019). Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi. *JPI: Jurnal Politikom Indonesia*, 4(2), 1-23. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3228>
- Fautanu, I., M, B., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 87-112.
- Firman, F., Rahmawati, R. (2023). Media Ownership And Democracy Processes in Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(1), 35-46.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, N. (2013). *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genalogi Dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press.
- Ihsani, M. H. (2022, Mei). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2, 95-104.
- Klandermans, B. (2005). *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lestari, D. (2019, Juni). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 4, 12-16.